



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022**



PAPARAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

DISAMPAIKAN OLEH :
SUHERMAN. SP, M.Si

ACARA EVALUASI SAKIP & RB
Tanggal 22 Agustus 2022

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG**



Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Fungsi

- ✓ Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- ✓ Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



VISI DAN MISI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG

VISI

Terwujudnya Fungsi Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat

MISI

Merumuskan kebijakan pengelolaan persampahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan;

Meningkatkan kapasitas lembaga, sumber daya manusia dan instrumen pendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;

Meningkatkan koordinasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara efisien, adil dan berkelanjutan;

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kerusakan, pencemaran lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keterkaitan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (Rpjmd) kabupaten rejang lebong



Visi

“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya Untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, Untuk Sejahtera Dan Maju Bersama)”

Misi ke-9

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Integratif dan Kolaboratif”

Program Prioritas

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. REJANG LEBONG

Misi ke-9

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur Yang Integratif dan
Kolaboratif”



Program Prioritas

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

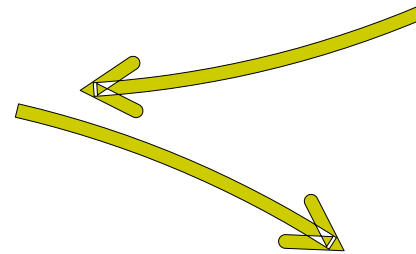
Tujuan

- 1, Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- 2, Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup



Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
3. Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan LH
4. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Indeks kualitas air (IKA)
2. Indeks kualitas udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
4. Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan
Prosedur Pengolahan Limbah Industri
5. Persentase Pengelolaan Persampahan

Program kegiatan yang mendukung dalam pencapaian iku

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG

PROGRAM

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Penataan dan Penaatan LH

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Pengendalian Pencemaran Kerusakan LH

- Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengelolaan Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

- Program Pengelolaan Persampahan

- Pengelolaan sampah
 - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

DUKUNGAN ANGGARAN

ANGGARAN
Rp. 9.303.576.758,00

POHON KINERJA DINAS LINGKUANGN HIDUP

KEPALA DINAS/ESS II

Tujuan : Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan LH
Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Sasaran 1

Meningkatnya pengawasan dan perlindungan pengendalian lingkungan hidup
Indikator : - Persentase pelaku usaha yang melaksanakan prosedur pengolahan limbah industri dan domestik

KABID PENATAAN DAN PENDATAAN LH

Program : -Perencanaan Lingkungan Hidup
-Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan Pengelolaan LH (RPPLH)

Sasaran II

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah
Indikator : Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indeks Kualitas Lahan (IKL)

KABID PPKLH

Program : - Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan LH
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Sasaran III

Meningkatnya pengelolaan persampahan
Indikator : Persentase pengelolaan persampahan

KABID PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Program : Pengelolaan Persampahan

KASI Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Keg : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin LH dan izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
Indikator : Persentase Pelaku Usaha yang memiliki izin Lingkungan

KASI Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Keg : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota
Indikator : Jumlah Dokumen RPPLH Kab/Kota yang Tersusun

KASI Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Keg : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota
Indikator : Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

KASI Kerusakan Lingkungan Hidup

Keg : Penjegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
Indikator : -Hasil Pengujian Indeks Kualitas Air
-Hasil Pengujian Indeks Kualitas Udara

KASI Pengelolaan Sampah

Keg : Pengelolaan Sampah
Indikator : Timbulan Sampah yang Tertangani

CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung jawab
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat
						Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sekretariat
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket kompoine instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Sekretariat
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket/bahan yang disediakan	Sekretariat
								Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang diseediakan	Sekretariat
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang	Sekretariat

								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Sekretariat
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sekretariat
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sekretariat
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	Sekretariat
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Sekretariat

								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan gedung bangunan lainnya yang di dipelihara dan direhabilitasi	Secretariat
Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan domestik	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersucunya Dokumen RPPLH Kabupaten	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	Bidang PPPLH
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan yang taat	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan yang taat	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, surat lelayakan operasi oleh pemda kabupaten/kota.	Bidang PPPLH
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	• Indeks Kualitas Air (IKA) • Indeks Kualitas Udara (IKU) • Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air	Pencegahan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup[Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air	Bidang PPPLH

				Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Keanekaragama n Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan keanekaragama n hayati kabupaten/kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola lingup kewenangan kabupaten/kota	Bidang PPKLH
		Meningkatn ya Pengelolaan Persampaha n	Persentase Pengelolan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan Area Pelayanan	Pengelolaan Sampah	Timbunan Sampah yang Tertangani	Penangana Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Bidang Persampahan

Perjanjian Kinerja Tahun 2022



Tujuan/Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B
	Persentase Inovasi Yang Terealisasi	100%
Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan LH	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	100%
Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,16
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,58
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	47,88%

REKAPITULASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Realisasi / Target Capaian	Ket
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B	-	-
2	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan LH	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	25%	50%
3	Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	56,16	-	-
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		91	-	-
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	47,58	-	-
4	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	47,88%	11,97%	23,94%



Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2022

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Rencana/Target Capaian				Ket
				TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B	-	-	-	B	
	Persentase Inovasi Yang Terealisasi		100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan LH	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	25%	50%	75%	100%	
		Perencanaan LH						
Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	56,16	-	-	-	56,16	
	Indeks Kualitas Udara (IKU)		91	-	-	-	91	
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	47,58	-	-	-	47,58	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	47,88%	11,97%	23,94%	35,91%	47,88%	

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup TA. 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				Ket
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B	-	-			
	Persentase Inovasi Yang Terealisasi	100%	100%	100%			
Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Pengelolaan LH	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Prosedur Pengolahan Limbah Industri dan Domestik	100%	25%	50 %			
Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,16	-	-			
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91	-	-			
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,58	-	-			
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	47,88%	11,50 %	21,44%			

CROSS CUTTING PROGRAM

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati
5. Program pebinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
6. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
7. Program pengelolaan persampahan

7 PROGRAM

2020

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati
5. Program pebinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
6. Program pengelolaan persampahan

6 PROGRAM

2021

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati
5. Program pebinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
6. Program pengelolaan persampahan

6 PROGRAM

2022

PROGRES PERBAIKAN AKIP YANG TELAH DILAKUKAN

No	Area Perubahan	Before	After	Ket
1	Perencanaan Kinerja	Dokumen RENSTRA belum digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran telah mmengacu kepada Dokumen RENSTRA yang yang selaras dengan Dokumen RPJMD	
		Perencanaan kinerja tahunan belum menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran	Penyusunan anggaran mengacu kepada perencanaan kinerja yang optimal	
2	Pengukuran Kinerja	Perjanjian Kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Dibuat Hanya Pada Eselon II, III, Dan IV	Perjanjian Kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Telah disusun dari level Eselon II, III, Dan IV Sampai Dengan Seluruh Staf	
		Pengukuran Rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala	Rencana aksi Pada Dinas Lingkungan Hidup telah disusun dari level Eselon II, III, Dan IV Sampai Dengan Seluruh Staf Dan telah disusun secara berkala (triwulan)	
		Laporan capaian kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Dibuat Hanya Pada Eselon II, III, Dan IV dan belum dilakukan dilakukan secara berkala	Laporan capaian kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup telah disusun dari level Eselon II, III, Dan IV Sampai Dengan Seluruh Staf dilakukan secara berkala (triwulan)	
		IKU belum secara optimal dimanfaatkan dalam pengukuran kinerja	IKU menjadi dasar dalam pengukuran kinerja	
3	Pelaporan kinerja	Pelaporan kinerja belum disajikan secara optimal untuk peningkatan kinerja	Pelaporan kinerja menjadi bahan analisis dalam menilai dan peningkatan kinerja	
		Laporan kinerja belum menyajikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Informasi kinerja yang disajikan Laporan Kinerja dapat dipertanggungjawabkan	
4	Evaluasi internal	Belum adanya komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil dari evaluasi yang dilakukan untuk mengendalikan dan meningkatkan kinerja	Telah melakukan evaluasi kinerja secara optimal dan berkala terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan secara berjenjang dan berkala	

TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Agar RENSTRA dipublikasikan	Melakukan Penyempurnaan terhadap RENSTRA dan dipublikasikan
2	Dokumen RRENSTRA selaras dengan Dokumen RPJMD	Melakukan reviu Kualitas renstra dengan menyelaraskan dengan dokumen RPJMD
3	Dokumen RENSTRA menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	Melakukan direviu kualitas Renstra dan menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
4	Dokumen RENSTRA Digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana kerja dan anggaran	RENSTRA telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai
5	Target jangka menengah dalam RENSTRA dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	RENSTRA telah di review pencapaiannya secara berkala
6	Dokumen RENSTRA direviu secara berkala	RENSTRA telah di review sesuai dengan mekanisme yang ada dan sesuai hasil evaluasi berkala
7	Agar Perencanaan Kinerja (PK) dipublikasikan	Penyempurnaan perencanaan kinerja dari level paling tinggi sampai level staf dan langsung dipublikasikan
8	Perencanaan Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Penyempurnaan perencanaan kinerja dari level paling tinggi sampai level staf sebagai acuan dalam penyusunan anggaran
9	Mereview IKU secara berkala	IKU telah di review sesuai dengan mekanisme yang ada dan diubah sesuai hasil evaluasi ber dan telah dipublikasikankala
10	Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (Bulanan/triwulanan/semester)	Monitoring dan evaluasi data kinerja dan rencana aksi dan capaian kinerja per triwulan

11	Melaksanakan pemantauan target kinerja dan pencapaian kinerja	Pemantauan target kinerja dilaksanakan per triwulan dalam bentuk laporan capaian kinerja
12	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas Menerapkan <i>reward and punishment</i> sebagai dasar dalam	Setiap level melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan mensosialisasikan rencana <i>reward and punishment</i> dan metode pengukuran kinerja yang akan diterapkan
13	Mereview IKU secara berkala	IKU telah di review sesuai dengan mekanisme yang ada dan diubah sesuai hasil evaluasi berkala
14	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi akan dilakukan secara berkala (bulan/triwulan/semester)	Monitoring dan evaluasi rencana aksi dan capaian kinerja per triwulan
15	Mengupload laporan kinerja ke dalam website	Mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan yang dilengkapi dengan data pendukung foto, grafik, gambar, tabel, dan pendukung lainnya (dilaporkan secara berkala)
16	Laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan
17	Memperbaiki informasi kinerja dalam Laporan Kinerja agar dapat diandalkan	Dokumen Laporan Kinerja telah menggambarkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

18	Informasi Kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan pembandingan data kinerja provinsi/nasional jika ada
19	Informasi Kinerja disajikan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	Dokumen Laporan Kinerja telah yang disajikan untuk menilai, memperbaiki pelaksanaan dan kegiatan organisasi.
20	Informasi kinerja yang disajikan untuk peningkatan kinerja	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, Data pendukung foto, grafik, gambar, tabel, dan pendukung lainnya
21	Informasi kinerja yang disajikan digunakan untuk menilai kinerja	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)
25	Memperbaiki pemenuhan evaluasi agar hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
26	Memperbaiki kualitas evaluasi agar pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	Membuka forum diskusi terhadap hasil pemantauan rencana aksi sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan kegiatan
27	Memperbaiki kualitas evaluasi agar pemantauan Rencana Aksi memberikan alternatif yang dapat dilaksanakan	Melakukan evaluasi dan pemantauan Rencana Aksi
28	Memperbaiki kualitas evaluasi agar pemantauan Rencana Aksi menunjukkan perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang	Mengurangi/membatasi program yang kurang bermanfaat
29	Menindaklanjuti pemanfaatan evaluasi agar hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	Menerapkan teguran pada capaian rencana aksi yang tidak sesuai target
30	Menindaklanjuti evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah	Pemantauan rencana aksi dilaksanakan per triwulan dalam bentuk laporan capaian kinerja



TERIMA KASIH